

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program dari BPJS Kesehatan yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan secara menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. JKN merupakan jaminan sosial di bidang kesehatan, dan pelaksanaannya menggunakan prinsip kegotongroyongan dengan kepesertaan yang bersifat wajib. Seluruh masyarakat Indonesia wajib terdaftar sebagai peserta JKN tanpa terkecuali.

Peserta JKN terdiri dari dua jenis yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). Peserta PBI merupakan peserta dari golongan fakir miskin dan orang tidak mampu. Iuran peserta PBI dibayarkan oleh pemerintah, sedangkan peserta Non PBI, membayar iuran secara mandiri. Peserta Non PBI adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, seperti pekerja swasta, PNS, anggota TNI dan Polri, serta pegawai informal yang tidak termasuk golongan peserta PBI (Kemenkes, 2013).

BPJS Kesehatan bersama Pemerintah sudah menegaskan bahwa kepesertaan JKN bersifat wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berbeda dari hal tersebut, faktanya, hingga saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia belum terdaftar dalam kepesertaan JKN secara keseluruhan. BPJS Kesehatan bersama Pemerintah menargetkan bahwa di tahun 2020, 95 persen penduduk Indonesia sudah terdaftar dalam program JKN (Sekretaris Utama BPJS Kesehatan, 2019). Pada pertengahan tahun 2020 saat ini, target tersebut belum tercapai. Data per 31 Juli 2020 menunjukkan bahwa, peserta JKN mencapai 221.835.244 juta jiwa atau 83 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 269 juta jiwa. Jumlah tersebut sudah cukup meningkat jika dilihat pada data per 31 Desember 2018, yang menunjukkan kepesertaan JKN masih mencapai 78,46 persen atau lebih dari 208 juta jiwa (BPJS Kesehatan, 2020). Jumlah peserta JKN sudah mengalami peningkatan tetapi kepesertaan tetap belum mencapai target. Tidak bisa dipungkiri

bahwa masyarakat yang belum terdaftar dalam kepesertaan JKN masih ada dan dalam jumlah yang tidak sedikit.

Pada kepesertaan JKN, peserta Non PBI terdiri dari peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja. Peserta PBPU meliputi pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk PNS yang bukan penerima upah, kemudian peserta bukan pekerja meliputi pemberi kerja, dan penerima pensiun (Kemenkes, 2014). Berdasarkan data per 31 Juli 2020, persebaran terbanyak kepesertaan JKN terdapat pada peserta PPU yang mencapai 54.881.825 juta. Pada peserta PBPU jumlah peserta mencapai 30.382.549 juta, dan peserta bukan pekerja mencapai 5.202.759 juta (BPJS Kesehatan, 2020). Di Indonesia, total pekerja usia 15 tahun keatas per Agustus 2019, sebanyak 126,51 juta jiwa. Persebaran terbanyak terdapat pada pekerja informal, yaitu mencapai 70,49 juta jiwa. Angka ini lebih tinggi dari pekerja formal yang hanya 56,02 juta (BPS, 2020). Berdasarkan data BPJS Kesehatan dan BPS tersebut, menunjukkan bahwa jumlah peserta PBPU masih sedikit dibandingkan dengan total pekerja informal di Indonesia. Jumlah yang lebih rendah jika dibandingkan dengan total yang belum terdaftar dalam kepesertaan JKN.

Pekerja di Indonesia mayoritas adalah pekerja informal. Pekerja informal merupakan pekerja yang tidak berpenghasilan tetap dengan tempat pekerjaan yang tidak memiliki keamanan kerja serta tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut (BPS, 2012 dalam Purwandari, 2015). Deranti (2019) juga menjelaskan bahwa sektor informal merupakan pekerjaan tanpa relasi kerja, yang berarti tidak ada perjanjian yang mengatur elemen-elemen kerja, upah dan kekuasaan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pekerja informal merupakan pekerja yang bekerja tanpa memiliki keterikatan resmi dengan penghasilan tidak tetap serta tidak memiliki perlindungan khusus dalam keamanan bekerja. Contoh jenis pekerjaan pada sektor informal antara lain, petani, peternak, pedagang, buruh, dan lain-lain. Pada umumnya pekerja sektor informal adalah mereka yang paling mudah terpapar berbagai resiko, dan kelompok ini adalah kelompok yang paling tidak terlindungi juga minim akan informasi sehingga membuat mereka tidak paham pentingnya proteksi berupa asuransi (Deranti,

2019). Hal tersebut merupakan salah satu alasan masyarakat belum bergabung dalam kepesertaan JKN.

Penulis melakukan survey terhadap suatu daerah yang diduga masih terdapat pekerja informal yang belum terdaftar dalam JKN dalam jumlah yang tidak sedikit. Daerah tersebut terletak di Desa Hadiluwih, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Desa Hadiluwih merupakan desa dengan penduduk mayoritas bekerja pada sektor informal. Berdasarkan hasil survey, terdapat 1463 orang pekerja di desa Hadiluwih dengan 1298 orang pekerja informal dan 165 orang pekerja formal. Pada desa Hadiluwih, terdapat peserta PPU sebanyak 165 orang dan peserta PBPU sebanyak 565 orang (Kepala Desa Hadiluwih, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah peserta PBPU di desa Hadiluwih masih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah total pekerja informal yang mencapai 1298 orang.

Pada Desa Hadiluwih, terdapat berbagai macam masalah pada pekerja informal yang melatarbelakangi belum terdaftarnya dalam kepesertaan JKN. Penulis membuktikan dengan melakukan wawancara singkat kepada beberapa pekerja informal yang belum terdaftar dalam kepesertaan JKN. Kurangnya pemahaman terhadap program JKN menjadi salah satu alasan pekerja informal belum terdaftar dalam kepesertaan. Kurangnya pemahaman menghasilkan tanggapan yang berbeda-beda terhadap adanya program JKN. Tidak sedikit yang tidak setuju karena menganggap mengikuti kepesertaan JKN tidak memberikan manfaat namun malah membuat rugi. Alasan lainnya adalah terkait finansial. Pada dasarnya mereka mampu membayar iuran per bulan dengan mengambil kelas terendah, namun penghasilan tidak tetap setiap bulan yang akhirnya membuat mereka mengurungkan niat untuk mendaftar kepesertaan JKN. Mereka khawatir ketika suatu saat penghasilan mereka menurun kemudian tidak mampu membayar iuran. Kantor BPJS Kesehatan yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal juga menjadi alasan mereka belum mendaftar kepesertaan JKN. Jarak yang jauh tersebut membuat mereka malas untuk mengurus proses pendaftaran kepesertaan JKN.

Belum tercapainya upaya mewujudkan terdaftarnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan dalam JKN berkaitan dengan sikap yang diberikan oleh

masyarakat Indonesia terkait adanya JKN dan kepesertaannya yang bersifat wajib (Nadia Husnun dan Dina Lusiana, 2017). Menurut Midi dan Damayanti (2014), sikap masyarakat dalam program JKN adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan menerima program tersebut dengan menunjukkan sikap positif dan negatif dari yang sudah menjadi peserta ataupun yang belum menjadi peserta dalam program JKN. Pada penelitian Midi dan Damayanti (2019) juga dijelaskan bahwa ada pengaruh signifikansi antara variabel sikap dan kepesertaan. Jenis sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat, menjadi latar belakang alasan masyarakat belum terdaftar dalam kepesertaan JKN.

Sikap diartikan sebagai suatu reaksi pandangan atau perasaan seorang individu terhadap objek tertentu (Gerungan, 2004). Sikap seseorang terhadap objek akan membentuk perilaku individu terhadap objek tersebut. Sarlito dan Eko (2009), juga mengungkapkan bahwa sikap adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh seorang individu terhadap suatu objek. Objek yang disikapi oleh individu dapat berupa benda, manusia atau informasi. Proses penilaian seseorang terhadap suatu objek dapat berupa penilaian positif dan negatif. Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai sikap, maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu bentuk reaksi atau respon berupa penilaian dari seorang individu terhadap suatu objek. Penilaian yang muncul, positif atau negatif dipengaruhi oleh hal-hal yang dipahami dan informasi yang diterima.

Berdasarkan uraian di atas, dengan melakukan peninjauan secara langsung di Desa Hadiluwih, penulis mengambil judul “Gambaran Sikap Pekerja Informal yang Belum Terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Desa Hadiluwih”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana sikap pekerja informal yang belum terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional terkait adanya program Jaminan Kesehatan Nasional dan kepesertaannya yang bersifat wajib?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui sikap pekerja informal yang belum terdaftar dalam kepesertaan JKN terhadap program JKN di Desa Hadiluwih

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Poltekkes Kemenkes Malang

Dapat menambah referensi pengetahuan dalam perkuliahan pada mahasiswa prodi D3 Asuransi Kesehatan khususnya mengenai sikap pekerja informal yang belum terdaftar dalam program JKN.

1.4.2 Bagi Peneliti

Mendapat pengalaman berharga dapat mengetahui sikap pekerja informal yang belum terdaftar dalam program JKN.

1.4.3 Bagi BPJS Kesehatan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi BPJS Kesehatan dalam meningkatkan jumlah angka kepesertaan khususnya pada peserta PBPJ.